



Gubernur Minta Daerah Perhatikan Data dalam Pembangunan

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar Sutarmidji mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan data dalam setiap pembangunan. Menurutnya, data merupakan penentu arah kebijakan dan upaya implementasinya, terlebih selama ini tidak banyak daerah yang memperhatikan data dalam pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Sutarmidji saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sensus Penduduk 2020 lanjutan tingkat Provinsi Kalbar pada Kamis (12/5).

"Kalau daerah tidak memperhatikan data dan indikator pembangunan maka akan repot. Anggaran sebesar apapun tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak memperhatikan data," ucap Sutarmidji.

Midji memastikan saat menyusun rencana pembangunan dirinya selalu memperhatikan data nyata (real). Karena menurutnya tidak mungkin data yang tidak valid akan menghasilkan program yang bagus. Selain itu melihat indikator yang akan diselesaikan juga sangat penting dalam setiap proses pembangunan.

"Data juga harus teruji, saya terbiasa mensinkronkan setiap data, jika tidak sinkron maka tidak betul. Ini seni kita memahami data," katanya.

"Saya minta perbaikan-perbaikan data itu harus yang betul, saerah juga harus betul betul memperhatikan data itu," tambahnya.

Midji mengungkapkan peristiwa mandor sangat

berdampak pada lambannya pergerakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Pasalnya dalam peristiwa tersebut Provinsi Kalbar kehilangan dua generasi.

Akibat peristiwa tersebut banyak masyarakat yang saat ini berusia 50 hingga 60 tahun tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Sehingga hal tersebut menurut Sutarmidji harus mendapatkan perhatian untuk diperbaiki. Sehingga kedepan generasi penerus Kalbar akan semakin lebih baik lagi.

"Kalau angka harapan lamanya belajar usia 18 tahun kita lebih tinggi dari Jawa Barat. Kita 12,65 sedangkan Jawa Barat itu 12,55," jelasnya.

"Angka harapan hidup kita sudah 70 tahun artinya sudah bagus, pertumbuhan ekonomi sudah bagus," tutupnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan bahwa data menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari data penduduk, kondisi perekonomian, kemiskinan dan lain sebagainya.

"Data itu bukan segalanya tetapi jika tanpa data kita akan kehilangan segalanya," ujar Bahasan usai membuka pelatihan petugas Sensus Penduduk 2020 Lanjutan di Pontianak, Rabu (11/5).

Menurutnya, pelaksanaan Sensus Penduduk selaras dengan pencanangan Sistem Satu Data Indonesia. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh lapisan masyarakat mendukung dan

mensukseskan program tersebut.

"Sehingga dengan Satu Data Indonesia akan menghasilkan data yang terintegrasi, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Bahasan menambahkan, data-data yang terhimpun itu bisa dengan mudah diakses pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sebuah institusi yang menghimpun dan menganalisis data sangat bermanfaat bagi program dan kepentingan pembangunan khususnya di Kota Pontianak.

Dengan data yang valid dan akurat, maka akan memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyusun dan menganalisis program sehingga berdampak pada pembangunan.

"Misalnya data penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta data terkait kebijakan dalam menyikapi pengendalian inflasi daerah," tuturnya.

Dia pun berharap para petugas sensus bisa bekerja secara profesional dan maksimal dalam melaksanakan pendataan penduduk. Apalagi, Kota Pontianak sangat majemuk dengan adat dan budaya serta latar belakang penduduknya.

"Saya yakin di lapangan akan bertemu hal tersebut sehingga diharapkan tidak menjadi halangan atau hambatan dalam pelaksanaan sensus penduduk," pungkasnya. **(din)**